

AKUNTANSI DAN AKUNTABILITAS NGO: IMPLEMENTASI GLOBAL FUND, BUDAYA MENOLONG, DAN PENGETAHUAN AKADEMISI

Nisfatul Izzah*

Universitas Widyia Mataram, Jalan Dalem Mangkubumen, Yogyakarta, Indonesia

*Nisfatulizzah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 31, 2021

Revised April 16, 2022

Accepted May 31, 2022

Key words:

Akuntansi NGO; Akuntabilitas;
Hibah Luar Negeri

DOI:

<https://doi.org/10.33508/jako.v14i2.3519>

ABSTRACT

Research Purposes. This study aims to produce research on the development of new products of NGO accountability. This study describes the implementation and accounting treatment of foreign grants The Global Fund AIDS Tuberculosis and Malaria (GFATM) in Sub Recipient TB Care 'Aisyiyah Jatim (SR).

Research Methods. This study uses qualitative methods with data triangulation instruments.

Research Result and Findings. The results showed that GFATM grant accounting process and accountability is very systematic, structured, complete and strict. Accountability can be realized from a helping behavior and providing NGO accounting education from the academic level. The implementation of foreign grant accounting and NGO accountability in this study is very important both empirically and theoretically as a reference for NGO managers, foreign grant activists and new knowledge from academics. Beneficiaries can prepare accounting and accountability of non-profit organizations properly and correctly.

ABSTRAK

Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan riset perkembangan produk baru akuntabilitas NGO. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan perlakuan akuntansi hibah luar negeri The Global Fund AIDS Tuberculosis and Malaria (GFATM) di Sub Recipient TB Care 'Aisyiyah Jatim (SR).

Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrument triangulasi data.

Hasil dan Temuan Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; proses dan pertanggungjawaban akuntansi dana hibah GFATM sangat sistematis, terstruktur, komplit, serta ketat. Akuntabilitas dapat terwujud dari budaya tolong menolong dan pemberian edukasi akuntansi NGO sejak di tingkat akademik. Implementasi akuntansi hibah luar negeri dan akuntabilitas NGO dalam penelitian ini sangat penting baik secara empiris maupun teoritis sebagai rujukan para pengelola NGO, masyarakat penggiat hibah asing dan pengetahuan baru para akademisi. Para penerima manfaat dapat menyiapkan akuntansi dan akuntabilitas organisasi non laba secara baik dan benar.

PENDAHULUAN

Akuntansi selama ini masih identik dengan akuntansi organisasi laba/perusahaan. Sedangkan akuntabilitas publik penelitian-penelitian banyak mengarah dengan akuntabilitas pemerintah (Rahayu dan Sam, 2021). Adapun istilah hibah luar negeri di masyarakat Indonesia masih familiar sebagai transaksi pemerintah dengan negara asing atau pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah. Dewasa ini penerimaan hibah luar negeri tidak hanya dari hubungan bilateral dua negara atau pemerintah, tetapi juga oleh lembaga non pemerintah. Lembaga non pemerintah dapat berupa *Non-Governmental Organizations* (NGOs) atau di Indonesia dikenal dengan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi madani lainnya.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (PPA) sebagai organisasi sosial, keagamaan dan kemasyarakatan tertua di Indonesia, yaitu sejak tahun 1917, memiliki banyak sumber daya manusia dengan berbagai bidang keilmuan termasuk akuntansi. Namun 'Aisyiyah dan lembaga penerima hibah non pemerintah lainnya biasanya melakukan rekrutmen staf pelaksana hibah saat menerima hibah baru yang disesuaikan dengan kriteria donor.

Ditengarai oleh minimnya jumlah sumber daya akuntan yang tersedia di kota-kota kecil atau kabupaten-kabupaten kecil, serta minimnya

informasi akuntansi dan pengelolaan hibah luar negeri NGO di masyarakat dan kalangan akademisi menjadikan proses rekrutmen staf keuangan sempat mengalami hambatan.

Secara empirik dan teoritis penelitian program hibah TB Care 'Aisyiyah selama ini masih seputar bidang kesehatan atau kesehatan masyarakat, seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Muljono, Sugihen dan Susanto (2018); Ratnawati, (2019); Arini dan Hidayah (2020); Hanum dan Yanuarita (2020), serta bidang sosial dan humaniora lainnya Pratimaratri dan Maiyestati (2021; Aminah (2020); Hasmiati, Rita dan Amiruddin (2021).

Fenomena lain menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga dan tujuan organisasi dapat tercapai di sebagian besar lembaga apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Tetapi beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa; tidak ada ukuran evaluasi yang tepat untuk menilai sumber daya manusia (Jacob dan Farouq, 2013). Belum adanya regulasi pedoman untuk pelaporan sumber daya manusia, namun organisasi dapat mengambil keputusan untuk mengevaluasi nilai organisasi sumber daya manusia (Micah, Ofurum dan Ihendinihu, 2012). Disisi lain penelitian Hall dan O'Dwyer (2017) bertentangan tentang ukuran akuntabilitas. Ia menyakini bahwa akuntabilitas sangat penting dan sumber daya penyedia akuntabilitas di organisasi non laba dinilai sebagai aset takberwujud.

Beberapa periset juga tertarik untuk memasukkan kearifan lokal (tradisional) untuk merumuskan akuntabilitas, misalnya untuk menjaga integritas seorang akuntan Indonesia dapat memasukkan paham pancasila sebagai penghambat imperialisme etika akuntan (Ludigdo dan Kamayanti, 2012). Memasukkan budaya adat di Papua Nugini untuk mengidentifikasi cara pelaporan antara barat dan tradisional dan mempraktikkan pelaporan di koperasi (Brown dan Wing Wong, 2012). Sementara itu di belahan dunia lainnya esensi akuntansi dan akuntabilitas diyakini tertanam dalam budaya tradisional masyarakat adat terpencil di Australia Utara (Rossingh, 2012). Serta budaya fa"as Samoa sebagai indikator untuk tidak mengadopsi bentuk-bentuk akuntabilitas barat (Masoe, 2010).

Sedangkan penelitian yang berfokus tentang implementasi akuntansi NGO dan khususnya implementasi akuntansi dan akuntabilitas hibah luar negeri non pemerintah masih sangat terbatas. Padahal secara empirik sangat dibutuhkan masyarakat sebagai role model bagi NGO dan para

akademisi. Adapun penelitian sebelumnya terbatas tentang pentingnya pemahaman akuntansi publik non pemerintah di bangku akademik untuk calon akuntan (Singh dan Soral, 2011; Apsari dan Suhartini, 2021; Brewer, 2014; Uddin dan Belal, 2018). Sedangkan periset lainnya menunjukkan pentingnya untuk mengembangkan pemahaman akuntansi dan akuntabilitas NGO bagi para peneliti terkait regulasi, pembiayaan, struktur tata kelola, tujuan, pemangku kepentingan, dan kegiatan pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang (Cordery, Belal dan Thomson, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang akuntansi NGO dan akuntabilitas (Goncharenko, 2019; Ebrahim, 2003; Chowdhury, Mahjabeen dan Habib, 2019) belum memberikan contoh kongkrit tahapan penyajian akuntansi. Penelitian ini selain mendeskripsikan makna akuntabilitas juga memberikan hasil implementasi praktik tentang tahapan akuntansi NGO yang dibutuhkan oleh para pengguna. Penelitian ini juga terdapat kajian budaya menolong yang merupakan pencari dari masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai bagian pendukung terwujudnya akuntabilitas. Kajian literatur tentang urgensi akuntansi dan akuntabilitas NGO untuk akademisi secara global juga menjadi bagian dalam penelitian ini.

Jika akuntansi NGO dan akuntabilitas hanya terus diteliti dalam konteks kemanfaatannya saja, tanpa adanya penjelasan implementasinya, maka calon akuntan bahkan akuntan profesional sekalipun tidak akan memahami akuntansi NGO dan akuntabilitas hibah luar negeri hingga ia mempraktikkannya.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan, meringkas, mendeskripsikan implementasi dan perlakuan akuntansi publik non pemerintah dan berbagai kondisi, serta situasi atau fenomena yang ada pada akuntansi NGO guna menghasilkan riset perkembangan produk baru dalam bidang akuntansi dan akuntabilitas NGO khususnya hibah luar negeri GFATM di SR TB Care 'Aisyiyah Jatim.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi model dan implementasi praktik yang belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Implikasi dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai keilmuan baru bagi para penggiat hibah non pemerintah, serta para akuntan dan para calon akuntan.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi dan Akuntabilitas Hibah Luar Negeri NGO

Sejauh ini masyarakat memahami hibah se-

batas hibah pemerintah. Hibah pemerintah diartikan sebagai setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2013). Sementara itu Giplin dan Giplin (1987); Holsti (1995) mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh suatu negara tertentu (maju) kepada negara miskin dan berkembang. Dana hibah sebagai proses transfer uang, barang-barang, teknologi ataupun nasihat teknis dari negara pendonor kepada negara penerima.

Salah satu hibah luar negeri yang dikelola lembaga non pemerintah adalah GFATM atau cukup dengan nama Global Fund. GFATM merupakan lembaga keuangan dunia yang dirancang untuk menanggulangi tiga penyakit menular Aids, Tuberculosis (TB atau dulu TBC) dan Malaria. GFATM merupakan kumpulan beberapa negara donor yang bersekretariat di European Union (EU) Jenewa yang dananya terkumpul dari negara penyumbang di beberapa benua diantaranya negara-negara di benua Afrika, Amerika, dan negara maju di benua Asia. Selanjutnya dana yang terkumpul disalurkan kepada negara-negara yang membutuhkan yang tersebar sebanyak 140 negara di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia (The Global Fund, 2015).

Khusus di Indonesia ada tiga penerima hibah utama atau principal recipient (PR) GFATM untuk kategori penanggulangan TB, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Universitas Indonesia, dan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (PPA) melalui TB Care 'Aisyiyah (2009-2021) yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Salah satu Sub Recipient di Jawa Timur, yaitu SR TB Care 'Aisyiyah Jatim. Sebagai PR dari dana hibah GFATM 'Aisyiyah memiliki kewajiban mutlak dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelola sesuai dengan tujuan. Untuk mencapai pertanggungjawaban yang baik dan benar salah satunya wajib menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat disajikan sebagaimana mestinya apabila dilakukan seorang yang ahli, profesional, jujur, dan bertanggungjawab.

Akuntansi dan akuntabilitas hibah luar negeri NGO tidak luput dari peran penting akuntan sebagai penyaji laporan keuangan. Selain itu efektivitas mekanisme yang cocok, fleksibel dan aturan informal yang sesuai dengan jenis dan bentuk NGO juga berpengaruh pada akuntabilitas (Unerman dan O'Dwyer, 2006). Pentingnya contoh

praktik akuntansi dan akuntabilitas NGO untuk menunjukkan bagaimana akuntabilitas dibuat di berbagai macam jenis NGO di dunia. Chowdhury, Mahjabeen dan Habib (2019) menyebutkan bahwa di Bangladesh LSM yang berbeda menggunakan metode akuntansi dan sistem pelaporan yang berbeda, karena kurangnya standar akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga perbandingan antar LSM tidak mungkin dilakukan. Karena tidak ada IAS/IFRS, sangat sulit untuk mengikuti standar umum dalam pembuatan dan penyajian informasi akuntansi dan keuangan.

Sementara itu Ebrahim (2003) membedakan akuntabilitas NGO sebagai proses ke dalam lima mekanisme luas yang ditinjau dari laporan dan pernyataan pengungkapan, penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, pengaturan diri, dan audit sosial. Mekanisme dianalisis bersama tiga dimensi akuntabilitas: ke atas-bawah, internal-eksternal, dan fungsional-strategis. Akuntabilitas ke atas, yaitu kepada donor sedangkan ke bawah kepada para penerima manfaat. Akuntabilitas internal NGO dan eksternal kepada masyarakat luas. Adapun untuk meningkatkan akuntabilitas NGO dapat dilakukan dengan cara; pengamatan tradisional (pegawai), Audit sosial dan pengaturan diri, serta menekankan masalah tingkat sektor.

Secara empirik dan teoritis penelitian yang secara husus menyajikan implementasi akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah TB Care 'Aisyiyah belum ditemukan, tetapi dari beberapa literatur yang telah dibahas mayoritas dari akuntansi GFATM secara global. Akuntansi dan akuntabilitas dapat membantu negara-negara penerima dalam memerangi penyakit TB, HIV, dan Malaria dengan pertanggungjawaban dana yang sesuai sehingga dapat diterima kedua belah pihak. Akuntansi dan akuntabilitas terhadap dana GFATM dapat mengajarkan pemahaman anti korupsi bagi stakeholder di negara Afrika sub-Sahara, dan berbagai negara penerima di 34 negara yang telah di audit oleh *big four local fund agents* atau LFA (Sarpong dan Bein, 2021; Wafula, Marwa dan McCoy, 2014; Zelman, Melgar, Larson, Phillips dan Shretta, 2016; Chang, Rusu dan Kohler, 2021).

Budaya Akuntabilitas dan Pendidikan Akuntansi NGO

Budaya menolong merupakan salah satu budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Menolong atau dapat disebut juga *helping behavior* merupakan tindakan untuk mensejahterakan orang lain yang didorong oleh *motif altruistic* atau untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan tanpa rasa egois (Marjanovic, Struthers dan Greenglass, 2012).

Budaya menolong dalam konteks dunia kerja tidak selamanya memiliki makna membantu bahkan dapat mengganggu. Di Amerika budaya menolong dalam menyelesaikan pekerjaan dianggap sebagai sesuatu pengganggu yang tidak dikehendaki. Bagi seorang software engineers di Amerika memberikan bantuan hanya kepada mereka yang bersedia di bantu. Sama halnya dengan masyarakat Indonesia pekerja di India lebih bersedia untuk membantu, membantu siapa pun yang membutuhkan bantuan termasuk sesama software engineers. Perbedaan tersebut bukan karena pengaruh norma individualistis atau kolektivis itu sendiri, tetapi lebih pada cara membantu dibingkai dalam dua konteks yang berbeda (Siegel, 2012).

Budaya membantu ataupun gangguan pada performa kerja dalam bidang psikologi industri dan organisasi dikenal dengan dua istilah, yaitu *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) dan *Counterproductive Work Behavior* (CWB). Adapun definisi OCB menurut Organ (1997) dan Schnake (1991) adalah perilaku takbersyarat yang dilakukan oleh karyawan yang secara sengaja, bijaksana untuk meningkatkan fungsi organisasi meskipun tindakannya tidak dikenali atau dihargai oleh lingkungan organisasi. Sedangkan CWB atau disebut juga sebagai *workplace deviance behavior* (WDB) merupakan bentuk perilaku disfungsional yang dapat merugikan banyak pihak, tim, bahkan bagi individu dan organisasi (Tziner dan Barsheshet-Picke, 2014).

Sementara itu selain Singh dan Soral (2011) yang mengkritisi silabi akuntansi dan akuntabilitas NGO yang tidak diterapkan di universitas-universitas di seluruh India beberapa peneliti juga menekankan bahwa pemahaman budaya akuntabilitas dan akuntansi NGO harus ditanamkan sejak di bangku akademik. Houser, Krutka, Roberts, Pennington dan Coerver (2017) menjelaskan pentingnya budaya reformasi mental untuk peserta didik supaya memahami akuntabilitas sejak dini. Pembelajaran dengan cara pengajaran di kelas studi sosial dengan menciptakan ruang otentik, mengembangkan kurikulum paralel dengan tema generatif, dan mendorong kehadiran sejarah yang memvalidasi siswa sebagai agen. Adapun Hall dan O'Dwyer (2017) berpendapat bahwa konteks akuntansi dan akuntabilitas NGO yang sering kali *atypical* atau tidak beratur sangat memikat bagi sarjana akuntansi untuk dipelajari sejak jenjang akademisi. Hal ini mengingat tantangan pengukuran kinerja para calon akuntan dan akuntabilitas untuk beragam pemangku kepentingan, dan kebu-

tuhan untuk sering menyeimbangkan dan mendamaikan logika efisiensi dan efektivitas.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Penelitian dilakukan di The Global Fund Aids Tuberculosis and Malaria (GFATM) yang bertempat di Sub Recipient TB Care 'Aisyiyah Jatim. Pertimbangan ada pada kelebihan tempat ini, yaitu induk organisasi PR 'Aisyiyah merupakan pelaksana program TB dari organisasi non pemerintah satu satunya di dunia. Penelitian dilakukan mulai Januari 2020 s.d Maret 2021. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 staf keuangan daerah di Sub-sub recipient (SSR) atau biasa disebut dengan finance administration (FA-SSR). Mereka sebagai informan kunci dengan kriteria telah bekerja lebih dari 5 tahun.

Informan kunci adalah mereka yang telah melalui berbagai macam training keuangan dan telah berhasil menjalankan tugas keuangan dan berbagai kegiatan sekaligus beserta pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Para staf keuangan tersebut menunjukkan keberhasilannya melewati aturan keuangan yang terkenal lebih banyak ketentuannya ketimbang perusahaan profit pada umumnya. Mereka juga berhasil melewati proses audit yang berlapis yang itu belum tentu bisa dilalui oleh mereka yang bertahan tidak sampai 5 tahun sebagai staf keuangan hibah luar negeri. Tidak hanya itu 7 informan kunci ini juga berarti telah berhasil bekerja sama dengan timnya dalam menjalankan tugas dan perannya baik secara horizontal dengan tim daerah maupun vertikal dengan tim propinsi. Hal ini tidaklah muda mengingat sebelumnya banyak asumsi di masyarakat yang mengklaim akuntansi NGO dan akuntabilitas tidak mudah dilaksanakan, sedangkan 7 informan tersebut dapat melalui semua itu lebih dari lima tahun bahkan 10 tahun lebih dari pertama program berdiri hingga program selesai. Adapun peneliti dalam riset ini sebagai "orang dalam" kurang lebih 10 tahun.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Instrumen untuk penelitian menggunakan metode triangulasi data, yaitu data yang berupa opini subjek hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Bungin (2014) menjelaskan bahwa data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion* (FGD). Sejalan dengan itu Sugiyono (2014) mengungkapkan bahwa triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun penjelasan teknik pengumpulan data sebagai berikut ini:

1. Wawancara (*in-depth interview*). Pada metode ini peneliti melakukan wawancara kepada 7 staf keuangan daerah, yaitu FA SSR Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Surabaya, Propinsi Jatim (Yunus, 2016). Adapun secara garis besar wawancara menggali tentang pengalaman yang diperoleh selama menjadi staf keuangan, hambatan dan kelebihan menjadi staf keuangan hibah Global Fund, serta penjelasan teknis pembuatan laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang akuntansi NGO dan akuntabilitas (Sugiyono, 2014).
2. Metode Observasi Partisipatif. Metode observasi dilakukan peneliti dengan terlibat aktif dan berpartisipasi sebagai bagian dari tim pelaksana program dan pimpinan lembaga (orang dalam), sebagaimana Brannen (2005) menyebutkan bahwa peranan peneliti sebagai "orang dalam" seluruhnya penting untuk dibahas dan dibawah dalam hubungannya dengan masing-masing fase penelitian. Keterlibatan peneliti sebagai orang dalam melakukan pengamatan secara langsung di Provinsi Jatim tempat peneliti bekerja juga observasi langsung ke 7 daerah yang ada informan kunci. Observasi dilakukan dengan membuat catatan-catatan *fieldnotes* terhadap dokumen dan para pelaksana program hibah yang dibuat dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan objek dilakukan sampai semua data terkumpul dan selesai (Yunus, 2016).
3. Dokumentasi. Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang meliputi; telaah literature pada buku-buku akuntansi untuk membentuk landasan teori, penelitian terdahulu terkait dengan akuntansi dan akuntabilitas NGO, *browsing* di *website*, bukti, catatan, dokumen atau arsip-arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan oleh 'Aisyiyah Jawa Timur (Bungin, 2014). Adapun dokumen yang dibutuhkan meliputi; Pedoman Implementasi Program (PIP) dan petunjuk teknis (juknis) keuangan, serta semua data yang dapat mencerminkan akuntansi dan akuntabilitas. Sedangkan yang bukan merupakan dokumen SR 'Aisyiyah penulis dapatkan dari sumber literatur, keluaran artikel, jurnal, maupun kolom berita yang tersedia dari berbagai sumber.

Sugiyono (2014) menyebutkan bahwa tantangan penelitian kualitatif adalah pada peran teori. Adapun tantangan pada penelitian ini adalah minimnya literature terkait akuntansi NGO dan akuntabilitas, khususnya di Indonesia, sehingga basis teori tidak mutlak ilmu akuntansi saja, tetapi juga ada kaitannya dengan ilmu administrasi publik, misalnya pada pengertian hibah dan kerjasama luar negeri. Selain itu variable penelitian juga tidak dapat ditentukan pada awal penelitian dengan jelas sampai pada proses panjang (1 tahun 3 bulan) dapat dipastikan 7 FA SSR yang bisa mewakili menjelaskan kondisi obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akuntansi Hibah Luar Negeri GFATM

Penelitian ini menemukan bahwa pendanaan Global Fund menganut model pendanaan berbasis kinerja, yang artinya keputusan pendanaan didasarkan pada hasil penilaian transparan terhadap target yang telah terikat waktu. Metode ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan insentif bagi penerima supaya dana digunakan secara efisien guna mencapai suatu hasil. Hibah GFATM bersifat kuantitatif (*Fund Basic*) artinya semua output dari semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawaban keuangannya, secara rinci detail dan *complicated* disertai dengan bukti laporan narasi program (kegiatan).

Konsekuensi berbasis kinerja secara real dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendanaan untuk implementasi program (capaian target serta kasus temuan) dan untuk meningkatkan kekayaan skill bagi para pelaksana program (peningkatan sumber daya manusia). Implikasi dari model dan basis pendanaan tersebut berdampak pada keseimbangan antara capaian target program dengan keakuratan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan yang disertai dengan bukti-bukti pendukung administrasi yang lengkap dan tidak ada indikasi kecurangan (*fraud*) baik material maupun non-material. Ancaman *fraud* dalam hibah ini adalah penghentian program dan penarikan semua dana, serta resiko mengganti semua dana yang telah digunakan bahkan berujung pada *blacklist* internasional.

Supaya resiko internasional tidak terjadi seorang akuntan hibah luar negeri GFATM harus menguasai prosedur akuntansi dan instrumen keuangan hibah. Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi tahap implementasi akuntansi hibah GFATM dapat peneliti bagi kedalam tiga prosedur sebagai berikut:

1. Implementasi perencanaan, persiapan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa.
2. Implementasi pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, serta.
3. Studi implementasi audit hibah luar negeri.

Implementasi Perencanaan, Persiapan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan dokumen yang tersedia di PIP tahun 2009 dan juknis keuangan tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; suatu perencanaan pengelolaan hibah GFATM dimulai dengan membuat rencana kerja (*work plan*) dan anggaran yang tertuang dalam *Plan of Action* (POA).

Adapun kegiatan biasanya diawali dengan pencairan keuangan untuk transaksi pengadaan barang atau jasa. Ada dua bentuk pembayaran pengadaan barang atau jasa dan ada tiga metode pencairan dana hibah luar negeri GFATM.

Bentuk pembayaran itu terdiri dari:

- a. Pembayaran bentuk uang atau lumpsum. Uang diberikan jika berkaitan dengan pembayaran jasa profesi tertentu berupa fee, misal "fee narasumber". Fee mengganti keilmuan yang disampaikan. Fee kehadiran berupa perdiem yang diberikan kepada fasilitator atau panitia dan peserta menggantikan waktu kehadiran.
- b. Pembayaran berdasarkan bukti transaksi. Biasanya berkaitan dengan biaya pengadaan barang atau jasa.

Sedangkan metode pencairan dana, yaitu:

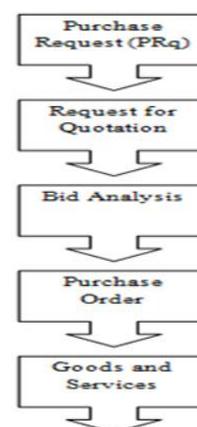
- a. Metode langsung. Metode ini apabila untuk aktivitas yang sudah pasti dan biasanya hanya satu kali tahapan.
- b. Metode uang muka (UM). UM untuk transaksi yang belum pasti total biaya yang akan terserap atau dibutuhkan. UM biasanya dibayarkan dalam beberapa tahap dan tidak bisa habis dalam satu waktu.
- c. *Reimbursement* dilakukan saat pengeluaran sudah tidak dapat dihindari, namun pencairan langsung tunai dan pengajuan uang muka belum dapat dilakukan, sehingga panitia atau staf mengeluarkan uang pribadinya terlebih dahulu kemudian mengklaim saat bukti transaksi sudah diperoleh. Khusus metode ini dapat dilakukan apabila bersifat sangat *urgen* saja dengan persetujuan pimpinan.

Adapun sebelum melakukan transaksi pengadaan barang/jasa harus memperhatikan beberapa tahap seleksi pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip dasar yang termuat dalam PIP

berikut:

- a. Efisiensi: menggunakan dana dan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan.
- b. Efektifitas: harus sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan keuntungan tertinggi.
- c. Kompetitif: dilakukan melalui proses pelelangan/pemilihan yang adil/setara.
- d. Transparansi: menekankan bahwa semua syarat dan informasi pengadaan barang dan jasa terbuka untuk semua pemasok yang mengajukan penawaran kecuali untuk pembelian dengan harga kurang dari Rp. 2.500.000.-
- e. Adil/tidak diskriminasi: semua pemasok mengajukan penawaran secara sama.
- f. Dapat dipertanggungjawabkan untuk menekankan pencapaian kualitas.

Alur dan ketentuan pengadaan barang/jasa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Flowchart Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: PIP TB Care 'Aisyiyah (2009)

Panitia yang membutuhkan barang/jasa mengajukan dengan mengisi PRq. Staf keuangan melakukan pengecekan untuk memastikan apakah barang dan jasa tersebut sudah tercantum di dalam *workplan* dan budget kemudian mengajukan *Request for Quotation* (Rfq) ke pihak manajemen program. Apabila biaya mencapai Rp. 2.500.000 panitia wajib melakukan analisa harga, kualitas, efektifitas dan efisiensinya dengan membuat rekap pemilihan pengadaan barang/jasa melalui tahap *bidding* sebelum staf keuangan membuat surat *Purchase Order* (PO) kepada supplier. *Bidding* yaitu proses membandingkan satu penyedia barang atau jasa dari supplier satu dengan supplier lain yang memiliki kriteria, jenis dan kualifikasi yang seimbang "*apel to apel*".

Pengadaan barang dengan ketentuan melakukan *bidding* supaya menyulitkan pelaksana di lapangan khususnya untuk daerah program kota dan kabupaten kecil. Sebagaimana transkrip wawancara berikut ini:

“Pengadaan barang dan jasa paling sulit dalam memperoleh supporting dokumen surat penawaran. Tidak semua supplier terbiasa membuatan kecuali perusahaan besar. Ketentuan untuk *bidding* menurut saya terlalu ketat, jika di atas Rp. 2.500.000 sudah harus menggunakan pembanding. Hal ini membuat laporan keuangan dari daerah menjadi lambat. Para FA SSR sangat kesulitan melengkapi dokumen yang diperlukan. Demografis daerah yang tidak merata sulit menemukan supplier yang sebanding” (FUU, Staf keuangan SR, 2021).

Implementasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

Berdasarkan dokumentasi PIP dan juknis keuangan diketahui bahwa; laporan keuangan dalam program Global Fund secara umum tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan non laba pada umumnya yang menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) atau perubahannya pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35 per tahun 2020). Meskipun begitu GFATM lebih menekankan pada jenis laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Neraca yang disebut dengan laporan posisi keuangan.
- b. Laporan biaya kegiatan yang disebut dengan laporan aktivitas.
- c. Laporan penerimaan hibah dibanding realisasi anggaran atau *source of use fund* (SUF).
- d. Arus kas.

Laporan keuangan di imput dan di akses dari *software* keuangan resmi yang diberi nama SIKA (Sistem Keuangan 'Aisyiyah) untuk tingkat propinsi dan PRA-SIKA untuk tingkat daerah. Laporan keuangan selanjutnya di kirim secara berjenjang dari daerah atau Sub-Sub-Recipient (SSR) ke provinsi (SR) dan terakhir terminal laporan berada di tingkat pusat (PR) dalam bentuk *soft file* dan *hard file* setiap bulan dengan ketentuan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.



Gambar 2. Aplikasi SIKA Nampak Depan

Implementasi penggunaan SIKA digunakan untuk konsolidasi laporan keuangan SSR dan SR. User wajib teliti dengan *code of account* yang sudah tersedia. Akuntan juga wajib mahir dalam pembukuan *double entry bookkeeping*, yaitu sistem pencatatan akuntansi ganda dalam akuntansi modern dengan metode pencatatan dua kali pada sisi debit dan kredit sekaligus dalam satu bukti transaksi keuangan.

Jenis laporan keuangan dan nama *software* sudah pakem dengan keinginan donor yang disesuaikan dengan peraturan untuk organisasi nirlaba. Global Fund mewajibkan PR untuk menyerahkan laporan *Principal Recipient's Ongoing Progress Update and Disbursement Request* (PUDR) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan semester (Periode): Maksimal 45 hari setelah selesainya aktifitas semester.
- b. Laporan tahunan: Maksimal 45 hari setelah akhir tahun fiskal
- c. Laporan tahunan yang telah diaudit maksimal enam bulan setelah berakhirnya periode yang diaudit.

Adapun lampiran dokumen laporan keuangan bulanan yang wajib disertakan seperti; Buku besar, berita acara penghitungan kas kecil, rekonsiliasi bank, copy rekening koran, buku bank, buku kas, daftar uang muka. Sedangkan masing-masing lampiran pendukung transaksi keuangan disertai voucher atau lembar pengesahan lengkap dengan copy pengajuan pengeluaran kas, satu paket pengajuan uang muka yang terdiri dari TOR, anggaran, detail pengajuan alokasi biaya, dan bukti legal lainnya, seperti surat penawaran dari supplier, dan tentu saja bukti transaksi keuangan berupa kwintansi, nota, atau invoice dengan cap lunas (bukan persoalan sepele, jika tidak ada cap lunas biaya tidak dapat diklaim).

Berdasarkan observasi dan dokumentasi selama menjadi “orang dalam” dapat diketahui bahwa dalam prakteknya masih sering ditemukan keku-

rangan bukti fisik dan kesalahan teknis lainnya. Kekurangan fisik dapat terjadi karena bukti tidak sesuai standar yang ditentukan atau memang logika berpikir staf keuangan tidak dapat memahami penjelasan juknis keuangan yang memang membutuhkan bukti yang sangat banyak dari pada bukti keuangan organisasi laba pada umumnya. Selain itu *double entry bookkeeping* yang tidak sesuai dengan kode akuntansi pada inputing data SIKA juga menjadi kendala tersendiri. Akibat dari hal ini proses review dan koreksi laporan dari SSR ke SR menjadi terkendala karena harus berulang kali.

Menurut peneliti masalah dan kekurangan tersebut dapat terjadi, karena beberapa kemungkinan berikut:

- a. Minimnya sumber daya akuntan yang ada di kota kecil dan kabupaten kecil. Staf keuangan daerah banyak yang tidak memiliki latar pendidikan akuntansi. Meskipun sama-sama dari fakultas ekonomi namun bukan akuntansi, melainkan manajemen, bisnis internasional, ekonomi Syariah. Bahkan lulusan pertanian dan pendidikan matematika.
- b. Tugas yang berlapis. Jadwal kegiatan yang banyak dalam satu waktu menjadikan *overlapping*, sehingga fokus terhadap tugas utama menjadi kurang.
- c. *Human Error* dan kurang teliti. Kesalahan satu ini juga tidak dapat dihindari. Akuntan tidak menyadari kesalahan input data yang dilakukan dan baru diketahui saat ada review dari staf keuangan SR.
- d. Adanya tindakan akuntan yang tidak sistematis, seperti meloncati salah satu tahapan atau bahkan menghilangkan satu tahapan tertentu (*lost procedures*). Misal, form UM tidak dibuat di awal, namun dibuat secara terbalik setelah penjurnalan bahkan ada yang dibuat setelah laporan keuangan dilaporkan.
- e. *Internal control* (IC) dari manajer atau koordinator dan kepala program saat menandatangani voucher kurang memperhatikan detail antara laporan dengan bukti pendukung.
- f. Para IC kurang memiliki rasa skeptis (*skeptisisme*). Audit mengartikan skeptis sebagai menumbuhkan sikap curiga sebelum benar-benar dilakukan koreksi dan bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya sampai IC merasa yakin dengan bukti yang logis. Sikap ini seharusnya mampu mendorong IC untuk mengontrol satu laporan dengan bukti yang lain. IC juga mengecek kesesuaian alur logika pertanggungjawaban dengan kegiatan

yang telah dilakukan. Sayangnya dalam satu kesempatan seseorang non akuntan masih berasumsi bahwa sikap skeptis masih dinilai tabu. Introgasi dianggap sebagai sikap curiga dalam arti negatif dan menyinggung perasaan seseorang yang di introgasi. Seharusnya jika para pihak menyadari arti skeptis secara profesional hal itu akan lumrah bahkan wajib dilakukan untuk menegakkan akuntabilitas.

Adapun untuk akuntan atau pihak pembuat laporan keuangan harus menjunjung tinggi etika profesional. Staf keuangan justru harus senang apabila ada introgasi terkait laporan yang dirasa belum sesuai, karena hal ini menunjukkan kesungguhan seorang IC dalam memastikan bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat siap dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Meskipun demikian berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini SR TB Care 'Aisyiyah Jatim dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak ada temuan audit yang buruk. Temuan dari proses audit nasional maupun internasional biasanya hanya bersifat administrative saja, sehingga *management letter* juga seputar untuk ketelitian saja. Hal ini tentu sangat menggelitik bagi peneliti untuk melakukan analisa lebih lanjut mengigit masalah yang dihadapi sangat kompleks saat proses membuat laporan. Untuk itu analisa bagian ini akan dikaitkan pada sub bab penelitian budaya akuntabilitas di SR Jatim.

Audit Keuangan Hibah Global Fund

Audit perusahaan pada umumnya cukup dengan pemeriksaan keuangan oleh audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) nasional. Sedangkan untuk hibah luar negeri Global Fund membutuhkan lebih dari satu KAP. Audit dilakukan KAP nasional dan internasional. Berikut ini adalah rentetan audit eksternal yang harus dihadapi penerima hibah Global Fund di TB Care 'Aisyiyah berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi:

- a. Auditor Eksternal dari KAP nasional atas inisiatif 'Aisyiyah pusat sebagai bentuk kewajiban dalam meyakinkan pertanggungjawabannya kepada donor.
- b. *Verivication of Identificationn* (VOI) dari Local Fund Agent (LFA) oleh GFATM melalui Prince Waterhouse Coopert (PWC). PWC Jenewa merupakan KAP big four, yaitu accounting firma atau jasa profesional kantor akuntan publik dalam bidang audit, dan jasa

penjaminan (*assurance*), perpajakan, konsultasi manajemen, *advisori*, aktuarial, dan keuangan korporasi (*corporate finance*) yang masuk ke dalam empat besar dunia. Sampai dengan penelitian ini dilakukan yang masuk kedalam *big four* adalah Deloitte Touche Tohmatsu, PwC (Price Waterhouse Coopers), EY (Ernst & Young), dan KPMG atau "Klynveld Peat Marwick Goerdeler". Disebut sebagai KAP *Big Four* karena keempat firma tersebut memiliki nilai aset yang besar, *revenue* yang dihasilkan, jaringan yang luas, serta reputasi dibidang internasional lebih besar dibandingkan dengan KAP-KAP lain diseluruh dunia.

- c. Financial Monitoring oleh PR dalam bentuk internal audit, serta audit lembaga 'Aisyiyah dan persyarikatan Muhammadiyah selaku induk organisasi.

Budaya Akuntabilitas di SR TB Care 'Aisyiyah Jatim

Hasil observasi sub bab implementasi akuntansi pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya disfungsi pertanggungjawaban atau pergeseran nilai tanggung jawab kontrol keuangan oleh sebagian manajemen pelaksana di daerah dan kepala SSR selaku IC. Manajer program juga kurang memiliki sikap skeptis saat melakukan kontrol keuangan. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa staf keuangan yang seharusnya di kontrol manajer pelaksana supaya tidak melakukan tindakan kecurangan justru oleh sebagian manajer pelaksana hanya pasrah semua urusan keuangan kepada staf keuangan semata. Proses pencairan, transaksi, hingga pelaporan dilakukan staf keuangan seorang diri tanpa pemisahan tugas. Urusan keuangan dianggap sebagai satu paket bagian kewajiban staf keuangan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas keuangan hibah kepada donor. Idealnya IC bertugas memastikan rencana organisasional dan semua tindakan yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong staf keuangan untuk mengikuti kebijakan organisasi, meningkatkan efisiensi operasi, memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Harrison, Horngren dan Thomas, 2014).

Akibat dari pemaknaan akuntabilitas yang tidak tepat dan kurangnya kontrol internal terdapat 2 staf keuangan dari salah satu daerah melakukan tindakan kontraproduktif atau *Counterproductive Work Behavior* (CWB) yang berujung pada tindakan kecurangan dan merugikan. Tindakan CWB tidak berlangsung lama, karena dapat dikurangi dengan menegakkan *Standard Operating Procedure* (SOP)

keuangan GFATM yang sudah tertata dengan baik, sistematis, terstruktur dan ketat.

Kontrol dan review laporan keuangan yang rutin dan kuat oleh spesialis keuangan di tingkat provinsi berhasil mengungkap kejadian kontraproduktif ini dengan cepat. Tindakan internal control yang kuat dalam kejadian ini dapat mencegah tindakan *fraud* yang lebih besar. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Fernandhytia dan Muslichah (2020) dan beberapa hasil penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa "sistem pengendalian internal memainkan peran penting untuk mencegah tindakan perilaku curang" baik di institusi pendidikan seperti yang diungkapkan Sofyani, Hasan dan Saleh (2021), maupun di institusi swasta seperti hasil penelitian Siregar dan Tenoyo (2015).

Disisi lain hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar staf keuangan justru dengan sangat sadar bahwa audit LFA akan sangat membahayakan tidak hanya untuk lembaga, tetapi juga untuk dirinya. Sehingga tidak sedikit dari para staf keuangan di tingkat provinsi dan tingkat kota atau kabupaten harus melakukan pekerjaan di luar tugas utamanya, seperti melengkapi dokumen dan membuat TOR yang tidak tersedia yang seharusnya menjadi tugas manajer pelaksana. Staf keuangan juga selalu siap menjadi panitia pelaksana kegiatan bersama dengan tim yang lainnya sekaligus merangkap sebagai bendahara kegiatan yang seharusnya itu dipisah untuk menghindari *overlapping*, terlebih akan menimbulkan kecurangan. Rupanya ada pendukung faktor lain yang dapat mencegah kecurangan tersebut. Selain karena pemeriksaan audit oleh KAP dan LFA yang akan menuntut pertanggungjawaban staf keuangan selaku penyedia laporan keuangan juga adanya faktor agama, tujuan utama program, dan kekompakan tim dalam mencapai tujuan kesuksesan bersama, baik sukses laporan keuangan juga sukses program.

Beberapa hasil wawancara menunjukkan pentingnya kerja sama tim salah satunya sebagaimana hasil transkrip wawancara berikut ini:

"Dalam program ini terdapat 4 orang dalam satu tim dengan *job desk* berbeda - beda, namun dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan dibutuhkan kerjasama tim dimulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban" (SS, FA SSR Nganjuk).

Hasil observasi dan wawancara membuktikan bahwa kekurangan dan kelemahan tim dapat dilengkapi satu sama lain melalui "budaya meno-

long". TB Care 'Aisyiyah merupakan program kemanusiaan yang tujuannya untuk menolong sesama, maka tim pelaksana juga dilatih menjadi insan yang penolong pula. Menolong tidak hanya untuk kebajikan kepada yang sakit, tetapi juga menolong sesama tim yang kesulitan dalam menjalankan tugas dan dalam rangka transfer *knowledge*, serta merancang *exit strategy* untuk kinerja yang lebih efektif dan efisien tanpa mengganggu tugas utama sebagai tanggung jawab profesional. Budaya menolong menjadikan semua kekurangan dalam tim pelaksana dapat saling tertutupi satu sama lain.

Semua tindakan menolong ini dilakukan sematamata untuk menegakkan akuntabilitas di kanca internasional. Tindakan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) juga dilakukan oleh para manajer pelaksana. Disisi lain sebagian tugas kontrol terkadang kurang, namun di satu sisi para manajer pelaksana tidak segan harus turun tangan mencari orang terduga TB yang seharusnya itu menjadi tugas utama para kader penyuluh. Menolong guna mempercepat capaian dan mempercepat pemutusan rantai penularan untuk dicatat sebagai terduga TB dan segerah dapat di lakukan tindakan periksakan dan dikawal pengobatannya oleh lembaga dengan lebih cepat dan terkendali.

Tindakan kontraproduktif oleh seseorang dapat terjadi akibat kurangnya kontrol internal. IC kapan saja dapat mengalami penurunan, baik karena *overlapping* kegiatan, tidak paham dengan fungsi kontrol internal, maupun karena niat pribadi individu untuk bertindak curang.

Budaya menolong berdampak pada akuntabilitas dan telah mendara daging pagi segenap pelaksana program TB di SR TB Care 'Aisyiyah Jatim. Training dan rapat-rapat rutin untuk meningkatkan pemahaman manajemen sangat berdampak pada kemampuan kontrol dan kemampuan memimpin tim. Segenap tim lambat laun memiliki satu persepsi, satu misi yang sama, yaitu tercapainya akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas dapat ditunjukkan dengan adanya "cerita sukses program" dan "cerita sukses keuangan".

Adanya peran para pimpinan organisasi yang selalu memberikan motivasi dan pengawalan terhadap program juga menjadi salah satu faktor penting dalam tercapainya akuntabilitas dalam budaya menolong. Para pimpinan organisasi di tingkat tinggi selalu mengawali kegiatan dengan materi keagamaan salah satunya dengan mengingatkan untuk menjadi insan penolong.

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya" (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya (Surat Al-Ma'idah; 2)".

Dalam kesempatan yang lain hasil wawancara dengan para staf keuangan SSR Bojonegoro, Nganjuk, Jombang, Kabupaten Kediri, dan Surabaya menunjukkan bahwa akuntabilitas telah menjadi "aset takberwujud" bagi para staf keuangan, karena kemanfaatan yang diperoleh sebagai pelaksana hibah luar negeri GFATM baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan. Manfaat takberwujud seperti; mendapatkan pemahaman umum tentang kesehatan TB dan Networking yang luas sebagaimana kutipan transkrip berikut:

"Mendapatkan ilmu baru, update ilmu termasuk pengetahuan umum TB, pengalaman baru, tantangan baru, dan relasi baru Dinas Kesehatan dan orang-orang akuntan profesional lainnya dikarenakan saya basicnya bukan akuntan, atau ekonomi, melainkan matematika." (AR, FA SSR Bojonegoro).

Hasil penelitian ini mendukung studi sebelumnya yang dilakukan (Susilawati, 2018). Semakin tinggi perilaku OCB dapat menurunkan tindakan CWB di perusahaan. Perilaku OCB dalam penelitian ini adalah dalam budaya menolong antar tim dapat mengurangi perilaku kecurangan (CWB) seperti yang pernah dilakukan dua staf keuangan daerah. Budaya menolong dapat melengkapi kekurangan dan kelemahan dalam diri masing-masing tim pelaksana, sehingga akuntabilitas dapat terwujud.

Urgensi Akuntansi NGO dan Akuntabilitas untuk Akademisi.

Berdasarkan hasil dokumenter berupa telaah artikel (jurnal) yang membahas tentang pentingnya pengetahuan serta pendidikan akuntansi dan akuntabilitas NGO. Hasil kajian ini menemukan beberapa artikel yang saling mendukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dieksplorasi melalui sejumlah artikel untuk menguatkan pentingnya akuntansi dan akuntabilitas lembaga non laba di dunia, khususnya di Indonesia.

Hasil literatur Singh dan Soral (2011) menunjukkan bahwa tidak satupun dari 32 universitas-

universitas di India yang memasukkan materi husus akuntansi dan akuntabilitas NGO padahal ada hampir 1,2 juta NGO di India yang pembukuannya masih jauh dari kata akuntabel. Urgensi kurikulum akuntansi NGO dipandang perlu, karena dana yang dikelola merupakan dana publik sedangkan akuntansinya masih belum terstandar dengan baik dan hanya mengikuti berbagai ketentuan masing-masing donor. Singh dan Soral (2011) mengusulkan kurikulum akuntansi NGO yang terdiri dari; Pengenalan tentang akuntansi NGO, konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, masalah terkait pendanaan asing/hibah, akuntansi berbasis dana, serta masalah terkait pajak penghasilan.

Sementara itu Cordery, Belal dan Thomson (2019) menyebutkan bahwa sudah saatnya para sarjana akuntansi memahami akuntansi dan akuntabilitas NGO masa lalu dan terlibat aktif dalam penelitian masa kini dan masa yang akan datang. Para akademisi di dorong untuk memahami akuntansi dan akuntabilitas karena persoalan kompleks yang dihadapi lembaga-lembaga non pemerintah dalam memaknai definisi organisasi non laba yang mengalami tafsir yang bervariasi dan kendala non distribusi, ketentuan standar akuntansi, laporan formal-informal dan lemahnya menjalankan praktik akuntansi dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan umum seperti aktivitas sosial, amal, advokasi.

Melihat hasil implementasi akuntansi hibah luar negeri GFATM dan permasalahan teknis, serta pernah adanya disfungsi pergeseran pertanggungjawaban yang disebabkan kurangnya pemahaman makna akuntansi dan akuntabilitas dari sebagian manajer pelaksana bahkan tindakan kontraproduktif yang mengarah pada kecurangan (Singh dan Soral, 2011; Su, 2014; Herawati, Candiasa, Yadnyana dan Suharsono, 2018; Apsari dan Suhartini, 2021) untuk merekomendasikan dalam pendidikan akuntansi diberikan silabi husus tentang akuntansi NGO dan akuntabilitas sejak dini. Adapun untuk melakukan pemahaman akan dampak dari tindakan CWB dan OCB di kalangan akademisi, maka studi kasus juga perlu ditingkatkan (Susilawati, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian menemukan bahwa; proses membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban akuntansi dana hibah Global Fund sangat sistematis, terstruktur, lengkap dan *complicated*, serta ketat baik anggarannya maupun auditnya yang berlapis. Audit meliputi audit induk organisasi, audit eksternal na-

sional dan *big four* internasional. Karena kondisi dan aturan tersebut terjadi beberapa kendala teknis dan kesulitan untuk melengkapi dokumen pendukung, seperti saat proses *bidding* pengadaan barang/jasa. Sempat adanya tindakan kontraproduktif (CWB) akibat kontrol internal yang kurang. Namun, berkat training-training dan pertemuan rutin antar tim pelaksana di berbagai tingkat daerah, provinsi dan pusat mampu mengurangi semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada tim pelaksana. Diketahui pula budaya tolong menolong (OCB) dapat meningkatkan akuntabilitas di antara tim dan organisasi. Sementara itu hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pemberian edukasi akuntansi NGO dan pemahaman akuntabilitas sebaiknya diberikan kepada calon akuntan sejak di tingkat akademik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu belum mengulas informasi jumlah terbaru NGO di Indonesia dan perkembangannya, serta belum adanya gambaran dinamika husus NGO-NGO kecil di Indonesia. Untuk itu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengulas lebih dalam tentang akuntansi dan akuntabilitas NGO-NGO di Indonesia dengan penciri yang khas bagi organisasi dan budaya masyarakat Indonesia seperti yang pernah dilakukan oleh (Fikri, Sudarma, Sukoharsono dan Purnomosidhi, 2010; Nurbatin, 2015). Penelitian ini memberikan pembelajaran sangat penting bagi pengelola NGO dan penggiat hibah asing lainnya, antara lain gambaran tentang prosedur akuntansi yang tepat dan sesuai dengan NGO secara runtut dapat diterapkan serta audit dan pertanggungjawaban dana hibah yang harus dilakukan oleh NGO tidaklah dapat dibuat main-main, karena melibatkan banyak pihak.

REFERENCES

- Aminah, S. (2020). Tindakan Sosial Kader TB Care dalam Menanggulangi Penyakit TB di Kota Malang. *KOMUNITAS*, 11(1), 21-38.
- Apsari, A. K. dan Suhartini, D. (2021). Religiosity as Moderating of Accounting Student Academic Fraud with a Hexagon Theory Approach. *Accounting and Finance Studies*, 1(3), 211-230.
- Arini, M., dan Hidayah, F. N. (2020). Edukasi Pencegahan Dan Deteksi Dini Komorbid TB-DM Pada Kader TB-HIV Care'Aisyiyah. *Prosiding. Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2020*: Yogyakarta.
- Brannen, J. (2005). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brewer, T. J. (2014). *Accelerated Burnout: How*

- Teach for America's Academic Impact Model and Theoretical Culture of Accountability Can Foster Disillusionment Among Its Corps Members. *Educational Studies*, 50(3), 246-263.
- Brown, A. M. dan Wing Wong, C. (2012). Accounting and Accountability of Eastern Highlands Indigenous Cooperative Reporting. *Social and Environmental Accountability Journal*, 32(2), 79-93.
- Bungin, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chang, Z., Rusu, V. dan Kohler, J. C. (2021). The Global Fund: Why Anti-Corruption, Transparency and Accountability Matter. *Globalization and Health*, 17(1), 1-11.
- Chowdhury, A. H. M. Y., Mahjabeen, M. dan Habib, M. M. (2019). Financial Reporting Practices of Local NGO's Operating in Bangladesh. *Journal of Economics, Business and Management*, 7(1), 24-28.
- Cordery, C., Belal, A. R. dan Thomson, I. (2019). NGO accounting and accountability: past, present and future. *Accounting Forum*, 43(1), 1-15.
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813-829.
- Fernandhytia, F. dan Muslichah, M. (2020). The Effect of Internal Control, Individual Morality and Ethical Value on Accounting Fraud Tendency. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 35(1), 112-127.
- Fikri, A., Sudarma, M., Sukoharsono, E. G. dan Purnomosidhi, B. (2010). Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Governmental Organization. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(3), 417-428.
- Gilpin, R dan Giplin, J. M. (1987). *The Political Economy of International Relations*. Didapatkan dari <http://www.jstor.org/stable/j.ctt19wcct3>, 10 Desember 2021, pukul 13:00WIB.
- Goncharenko, G. (2019). The Accountability of Advocacy Ngos: Insights From The Online Community of Practice. *Accounting Forum*, 43(1), 135-160.
- Hall, M., dan O'Dwyer, B. (2017). Accounting, Non-Governmental Organizations and Civil Society: The Importance of Nonprofit Organizations to Understanding Accounting, Organizations and Society. *Accounting, Organizations and Society*, 63, 1-5.
- Hanum, F., dan Yanuarita, H. A. (2020). Pelayanan Kesehatan dalam Program Community TB Care Aisyiyah Kabupaten Kediri. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2), 193-204.
- Harrison, W. T., Horngren, C. T. dan Thomas, C. W. (2014). *Financial Accounting*. New York: Pearson Education.
- Hasmianti, H., Rita, R. dan Amiruddin, A. (2021). Dakwah Aisyiyah melalui kader Tuberkulosis (TB) care di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 30-42.
- Herawati, N. T., Candiasa, I. M., Yadnyana, I. K., dan Suharsono, N. (2018). Factors That Influence Financial Behavior Among Accounting Students in Bali. *International Journal of Business Administration*, 9(3), 30-38.
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Houser, N. O., Krutka, D. G., Roberts, R. P., Pennington, K. dan Coerver, N. F. (2017). Navigating the Reform-Accountability Culture in Oklahoma Social Studies. *Theory and Research in Social Education*, 45(1), 7-42.
- Jacob, J. dan Farouq, S. (2013). A Review of Human Resource Accounting and Organizational Performance. *International Journal of Economics and Finance*, 5(8), 74-83.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2013). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah*. Didapatkan dari <http://www.ksap.org/sap/buletin-teknis-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-13/>.
- Ludigdo, U. dan Kamayanti, A. (2012). Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. *World Journal of Social Science*, 2(6), 159-168.
- Marjanovic, Z., Struthers, C. W. dan Greenglass, E. R. (2012). Who Helps Natural-Disaster Victims? Assessment of Trait and Situational Predictors. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 12(1), 245-267.
- Masoe, A. C. (2010). *Accountability in the Accounting Profession in Samoa: Exploring the Influence of Fa'aSamoa*. (Tesis, Master of Business, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand). Didapatkan dari <https://openrepository.aut.ac.nz/handle/10292/1193>.
- Micah, L. C., Ofurum, C. O. dan Ihendinihu, J. U. (2012). Firms Financial Performance and Human Resource Accounting Disclosure in Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(14), 67-75.
- Muljono, P., Sugihen, B. G. dan Susanto, D. (2018).

- Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pengobatan Penderita TB Pada Program “Community TB Care” Aisyiyah Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, 19(2), 129-142.
- Nurbatin, D. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi LSM dalam Proses Transformasi Sosial sebagai Jawaban Tuntutan Reformasi. *Ekonomika: Jurnal Ekonomi*, 8(2), 47-53.
- Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: It's Construct Clean-Up Time. *Human Performance*, 10(2), 85-97.
- Pratimaratri, U. dan Maiyestati, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Terdampak Tuberkulosis Melalui Pendampingan TB Care 'Aisyiyah Kota Bukittinggi*. (Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia). Didapatkan dari <http://repo.bunghatta.ac.id/6198/>.
- Rahayu, S. dan Sam, I. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Pinggir Air. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 109-121.
- Ratnawati, H. M. (2019). *Penetrasi Sosial Kader Community TB Care Aisyiyah dalam Proses Deteksi Dini terhadap Suspek Tuberculosis (Studi Kasus pada Kader Community TB Care Aisyiyah Surakarta sebagai Komunikator dalam Deteksi dini Suspek Tuberculosis di Surakarta)*. (Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia) Didapat dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70661/Penetrasi-Sosial-Kader-Community-TB-Care-Aisyiyah-dalam-Proses-Deteksi-Dini-terhadap-Suspek-Tuberculosis-Studi-Kasus-pada-Kader-Community-TB-Care-Aisyiyah-Surakarta-sebagai-Komunikator-dalam-Deteksi-dini-Suspek-Tuberculosis-di-Surakarta>.
- Rossingh, B. (2012). Collaborative and Participative Research: Accountability and the Indigenous Voice. *Social and Environmental Accountability Journal*, 32(2), 65-77.
- Sarpong, S. Y., dan Bein, M. A. (2021). Global Fund and Good Governance In Sub-Saharan Africa: Accounting for Incidence of Malaria and Quality of Life in Oil and Non-Oil Producing Countries. *SN Social Sciences*, 1(8), 1-32.
- Schnake, M. (1991). Organizational Citizenship: A Review, Proposed Model, and Research Agenda. *Human Relations*, 44(7), 735-759.
- Siegel, M. (2012). New Times for Multimodality? Confronting The Accountability Culture. *Journal of Adolescent and Adult Literacy*, 55(8), 671-681.
- Singh, A., dan Soral, G. (2011). A Note on Accounting Education: Accounting for NGOs. *Indian Journal of Accounting*, 42(1), 76-79.
- Siregar, S. V. dan Tenoyo, B. (2015). Fraud Awareness Survey of Private Sector In Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 22(3), 329-346.
- Sofyani, H., Hasan, H. A. dan Saleh, Z. (2021). Internal Control Implementation In Higher Education Institutions: Determinants, Obstacles and Contributions Toward Governance Practices and Fraud Mitigation. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 141-158.
- Su, C. (2014). Accounting for Accountability. *Public Administration Review*, 74(3), 424-428.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Susilawati, I. R. (2018). Perilaku Kerja Produktif dan Kontra Produktif: Sebuah Studi Meta-analisis. *MEDIAPSI*, 4(1), 7-21.
- The Global Fund. (2015). *The Global Fund 2015 Annual Financial Report*. Didapatkan dari https://www.theglobalfund.org/media/1325/corporate_2015annualfinancial_report_en.pdf.
- Tziner, A. dan Barsheshet-Picke, L. (2014). Authentic Management as a Moderator of The Relationship Between The Congruence of Gender Role Identity - Gender Management Characteristics, and Leader-Member Exchange (LMX). *Journal of Work and Organizational Psychology*, 30(2), 49-60.
- Uddin, M. M. dan Belal, A. R. (2018). Donors' Influence Strategies and Beneficiary Accountability: An NGO Case Study. *Accounting Forum*, 43(1), 113-134.
- Unerman, J., dan O'Dwyer, B. (2006). On James Bond and the Importance of NGO accountability. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(3), 305-318.
- Wafula, F., Marwa, C. dan McCoy, D. (2014). Implementing Global Fund Programs: A Survey of Opinions and Experiences of The Principal Recipients Across 69 Countries. *Globalization and Health*, 10(1), 1-10.
- Yunus, H., S. (2016). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zelman, B., Melgar, M., Larson, E., Phillips, A., dan Shretta, R. (2016). Global Fund Financing To The 34 Malaria-Eliminating Countries Under The New Funding Model 2014-2017: An Analysis of National Allocations and Regional Grants. *Malaria Journal*, 15(1), 1-15.